

# Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Yarlina Yacoub

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak  
Alamat Korespondensi, email: yarlina@gmail.com

**Abstract-***The research looked at the influence of unemployment on poverty districts/cities in the province of West Kalimantan. This study tested the 6 (six) hypothesis of the study period of 6 (six) years, from 2005 to 2010 using panel data in the form of time series data (2005-2010) and cross section (12 counties /cities) in the Province West Kalimantan. Model analysis in this regression via SPSS 18.0. Test results with significance level  $\alpha = 0.05$  are summary unemployment rate has significant influence on the poverty level, with  $t$  value  $0,002 < 0,05$  forming a relationship that is opposite (negative), which in theory should be the direction (positive).*

**Keywords:** *Unemployment and poverty.*

## I. Latar Belakang

Pembangunan dilaksanakan mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Kenyataan yang terjadi, dimana kondisi Kalimantan Barat dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan dengan Kalimantan lainnya, tetapi tingkat kemiskinan paling tinggi dari provinsi Kalimantan lainnya. Berdasarkan data BPS, tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat (5,44%) relatif lebih rendah di bandingkan Kalimantan Selatan (6,36%) dan Kalimantan Timur (10,83%), lebih tinggi dari Kalimantan Tengah (3,39%). Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat (9,30%) lebih tinggi dari Kalimantan lainnya, dimana Kalimantan Tengah (7,02%), Kalimantan Selatan (5,12%) dan Kalimantan Timur (7,73%).

Fenomena lain yang terjadi di Kalimantan Barat adalah penyerapan tenaga kerja tertinggi Kabupaten Pontianak (304.761 jiwa) dan terendah Kota Singkawang (68.363 jiwa) tetapi tingkat kemiskinan tertinggi Kabupaten Landak (18,65%) dan terendah Kabupaten Sanggau (6,25%). Kota/Kabupaten dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terbesar ternyata tidak diimbangi dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Pembangunan seharusnya menghasilkan kinerja pembangunan yang semakin baik daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Tetapi dari variabel makro ekonomi yang dicapai, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan, ternyata belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Barat. Permasalahan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, pengangguran yang relatif tinggi dan kemiskinan yang relatif masih tinggi.

## II. Rerangka Teori

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. “Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia”, (Tambunan, 2001:60). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain : perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun nonekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.

Secara umum pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, sejak tahun 1998 BPS menggunakan usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja.

Menurut Sumarsono (2009: 2-3):”Tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang yang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*). Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ataupun labour force terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan”.

Angka pengangguran menurut (Sumarsono,2009:6), “adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur”.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat bila output meningkat. Sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang memberi dorongan kepada perluasan kesempatan kerja agar alat-alat kebijakan ekonomi dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan pembangunan daerah yang pada dasarnya mempunyai fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari pembangunan daerah dan hubungan antara daerah. Pada hakekatnya tiap-tiap proyek pembangunan dilakukan dalam suatu daerah dan implementasinya harus menjadi komponen pembangunan.

Kemiskinan umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu (1) *Headcount Index*, (2) indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*). (3) indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*). *Headcount Index* digunakan untuk mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non makanan (*non food line*). Garis kemiskinan BPS sebagai dasar untuk perhitungan *Headcount index* ditentukan berdasarkan

batas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan setara dengan 2100 kalori per hari dan konsumsi non makanan.

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) menyatakan bahwa “kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (*low income*), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (*capability handicap*)”. Menurut Chambers dalam Nanga (2006), “kemiskinan terutama di daerah pedesaan (*rural poverty*) adalah masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*), keterisolasian (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan kelemahan fisik (*physical weakness*), dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi. Namun demikian, kemiskinan merupakan faktor penentu yang memiliki pengaruh paling kuat dari pada yang lainnya”.

Berdasarkan pemahaman di tersebut, maka kemiskinan dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi.

Sehubungan dengan ini menurut Bellinger (2007): “Konsep kemiskinan melibatkan multidimensi, multidefinisi dan alternatif pengukuran. Kemiskinan merupakan satu dari masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi *income* atau kekayaan dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi *income* atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, tetapi juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non-faktor keuangan ditandai dengan adanya keputusan atau ketidakberdayaan yang juga dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah”.

Sehubungan dengan situasi dan ciri kemiskinan dan agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah terutama pemerintah daerah harus meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang harus menjadi pusat perhatian untuk cepat ditanggulangi. Beberapa ahli berpendapat pendekatan yang dianggap cukup jitu dalam penanggulangan kemiskinan adalah menciptakan aktivitas ekonomi di daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Perry *et al.*,(2006) berpendapat: “pertumbuhan ekonomi penting untuk pengentasan kemiskinan. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh segmen dalam masyarakat”. Pandangan ini berdasarkan pada teori *Trickle Down* yang sangat dominan dalam teori-teori pembangunan pada era 1950 an dan 1960 an. Teori *Trickle Down Effect* menyebutkan adanya aliran menetes ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui fungsi-fungsi dalam ekonomi.

Octaviani (2001): “Penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke”, Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia”. Sementara Sasana (2009): “Penelitian ini menganalisa penyerapan tenaga kerja, penduduk miskin dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2005, tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat”.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis pada penelitian *diskriptif* dan *eksplanatory*. Dikatakan *diskriptif* karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti (Ruslan, 2006: 12). Selanjutnya penelitian ini menguji hubungan antar variabel, maka penelitian ini tergolong penelitian *eksplanatory* yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar variabel bebas (*exogen variable*) dan variabel terikat (*endogen variable*) (Ruslan, 2006:15). Terdapat 2 (dua) variabel yang akan diteliti yaitu : tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, dengan teknik analisis regresi melalui bantuan SPSS *for windows* versi 18.0. Data dalam penelitian ini merupakan data skunder yang

berasal dari BPS, merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara *time series* (tahun 2005 - tahun 2010, selama 6 (enam) tahun dengan *cross section* 12 (duabelas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

#### IV. Penyajian Data

##### Tingkat Pengangguran

Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010).

Tabel 1, menggambarkan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2005 sampai tahun 2010, dengan tingkat pengangguran rata-rata 6,43%. Selama beberapa tahun, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat turun, dimana tahun 2005 sebesar 8,13% dan tahun 2010 sebesar 4,62% dan semua kabupaten/kota tingkat penganggurannya turun. Beberapa daerah mampu menekan tingkat penganggurannya sehingga turun dengan cukup tinggi. Seperti Kota Pontianak tahun 2005 dengan tingkat pengangguran 16,86% dan tahun 2010 turun menjadi 7,79%. Kabupaten Bengkayang tahun 2005 tingkat pengangguran 8,52% dan tahun 2010 dengan tingkat pengangguran 3,21%. Kabupaten Ketapang tahun 2005 dengan tingkat pengangguran 10,27% dan tahun 2010 menjadi 3,90%. Kabupaten Sintang tahun 2005 sebesar 7,03% dan tahun 2010 turun menjadi 2,32%. Tahun 2010 hanya Kota Pontianak (7,79%), Kota Singkawang (8,05%) dan Kabupaten Pontianak (7,80%) dengan tingkat pengangguran di atas tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Barat (4,62%). Sedangkan kabupaten lainnya dengan tingkat pengangguran rendah dibawah provinsi. Tingkat pengangguran terendah Kabupaten Melawi (1,33%).

**Tabel 1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2010 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata2
1	Kab. Sambas	6,27	6,85	6,27	3,89	6,09	4,53	5,65
2	Kab. Bengkayang	8,52	13,57	5,87	4,71	4,02	3,21	6,65
3	Kab. Landak	4,11	3,92	3,36	4,03	4,38	4,61	4,07
4	Kab. Pontianak	9,72	12,45	9,23	9,07	9,75	7,80	9,67
5	Kab. Sanggau	8,05	9,30	4,39	2,80	3,30	3,62	5,24
6	Kab. Ketapang	10,27	11,12	5,91	4,29	5,15	3,90	6,77
7	Kab. Sintang	7,03	5,12	3,58	3,59	3,12	2,35	4,13
8	Kab. Kapuas Hulu	3,79	1,03	2,24	2,27	1,67	2,25	2,21
9	Kab. Sekadau	4,50	3,74	3,76	2,74	3,14	2,31	3,36
10	Kab. Melawi	0,99	1,03	2,60	1,96	1,82	1,30	1,40
11	Kota Pontianak	16,86	15,90	13,16	10,21	9,38	7,79	12,22
12	Kota Singkawang	8,07	9,16	11,05	10,09	9,71	8,05	9,36
	Kalimantan Barat	8,13	8,53	6,47	5,41	5,44	4,62	5,89

Sumber : BPS Kalimantan Barat (Data Sakernas 2005-2010)

Kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat diperkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan

pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang sebagian besarnya tingkat pengangguran relatif rendah. Walaupun dengan pendidikan yang relatif rendah, tersedianya sektor primer di pedesaan yang untuk memasuki lapangan pekerjaan ini tidak dengan persyaratan khusus, sehingga mempermudah penduduk untuk bekerja, dengan demikian tingkat pengangguran kabupaten lainnya relatif lebih rendah.

### Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran.

**Tabel 2**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2010 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata2
1	Kab. Sambas	15,10	16,77	14,00	11,51	9,96	10,08	12,90
2	Kab. Bengkayang	13,63	14,63	11,88	9,41	7,82	7,82	10,87
3	Kab. Landak	25,87	27,82	24,95	18,65	15,48	14,06	21,14
4	Kab. Pontianak	9,82	10,95	8,26	7,81	5,46	6,41	8,12
5	Kab. Sanggau	9,84	10,55	7,97	6,25	4,62	5,02	7,38
6	Kab. Ketapang	19,23	20,76	17,94	15,21	13,08	13,67	16,65
7	Kab. Sintang	19,09	19,80	17,10	13,61	11,55	9,75	15,15
8	Kab. Kapuas Hulu	16,90	17,76	15,05	11,44	9,93	11,39	13,75
9	Kab. Sekadau	11,76	12,57	10,25	7,66	6,42	6,77	9,24
10	Kab. Melawi	20,63	22,05	19,50	14,80	12,62	13,77	17,23
11	Kota Pontianak	6,84	7,15	6,77	9,29	6,38	6,62	7,18
12	Kota Singkawang	10,33	8,32	7,02	7,89	6,20	6,12	7,65
	Kalimantan Barat	14,24	15,24	12,91	10,87	9,05	9,10	11,90

Sumber : BPS (Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2005-2010).

Tabel 2, menggambarkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara rata-rata tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat 11,90%, artinya 11,90% dari penduduk Kalimantan Barat adalah penduduk miskin. Sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 rata-rata tingkat kemiskinan turun walaupun berfluktuasi. Tahun 2005 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar 14,24% dan tahun 2010 sebesar 9,10%. Secara umum tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat turun.

Ada 7 (tujuh) kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas (12,90%), Kabupaten Landak (21,14%), Kabupaten Pontianak (21,45%), Kabupaten Ketapang (16,65%), Kabupaten Sintang (15,15%), Kabupaten Kapuas Hulu (13,75%) dan Kabupaten Melawi (17,23%). Sedangkan Kabupaten/kota lainnya dengan tingkat kemiskinan di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2010 tingkat kemiskinan tertinggi di kabupaten Landak (14,06%) dan tingkat kemiskinan terendah (5,02%).

## V. Diskusi

Hasil estimasi pengaruh tingkat pengangguran (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditentukan sebesar ( $\alpha$ ) 0,05 atau  $0,002 < 0,05$ . Koefisien beta sebesar -0,405 yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tidak searah, yaitu apabila tingkat pengangguran meningkat berpotensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya apabila tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan berpotensi untuk naik, dan pengaruh tersebut signifikan.

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian**

<b>Variabel Bebas</b>	<b>Variabel Terikat</b>	<b>Standardized Beta</b>	<b>T hitung</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Tingkat Pengangguran (X)	Tingkat Kemiskinan (Y)	- 0,405	- 3,316	0,002	Signifikan

Sumber: Data Olahan SPSS 18.0, Tahun 2012.

Pengaruh tingkat pengangguran (X) tingkat kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat negatif dan signifikan disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian melibatkan hampir seluruh anggota keluarga (tingkat pengangguran yang rendah) tetapi dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah (karena sebagian besar bekerja), namun mereka tetap miskin.

Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empirik dari tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel menunjukkan bahwa adanya perbandingan yang tidak searah antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Secara umum kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran yang tinggi mempunyai kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, demikian sebaliknya. Hanya beberapa kabupaten dengan tingkat pengangguran yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan sebaliknya.

Untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan tingkat pengangguran rata-rata 5,89% dan tingkat kemiskinan rata-rata 11,9%. Jika dipetakan hanya ada (4) empat kabupaten yang mempunyai pola yang searah yaitu dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kabupaten Pontianak (9,67% dan 21,45%) serta Kabupaten Ketapang (6,77% dan 16,65%). Tingkat pengangguran yang relatif rendah dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah adalah : Kabupaten Sanggau (5,24% dan 7,38%) serta Kabupaten Sekadau (3,36% dan 9,24%).

Ada 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya mempunyai pola yang tidak searah yaitu dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah adalah Kabupaten Bengkayang (6,65% dan 10,87%), Kota Pontianak (12,22% dan 7,18%) dan Kota Singkawang (9,36% dan 7,65%). Tingkat pengangguran yang relatif rendah dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi adalah Kabupaten Sambas (5,65% dan 12,9%), Kabupaten Landak (4,07% dan 21,14%), Kabupaten Sintang (4,13% dan 15,15%), Kabupaten Kapuas Hulu (2,21% dan 13,75%) dan Kabupaten Melawi (1,40% dan 17,23%).

Fakta empiris menunjukkan bahwa bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Jadi dalam kasus ini, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada, tetapi memiliki hubungan yang terbalik. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut, orang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga, tetapi ada anggota rumah tangga

yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumahtangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan.

Kondisi tersebut (pada tingkat pengangguran yang meningkat dimana tingkat kemiskinan justru tidak ikut meningkat) banyak ditemui di daerah perkotaan. Pada saat kelompok bukan angkatan kerja (pelajar/mahasiswa) menamatkan pendidikan dan masuk dalam kelompok angkatan kerja, tetapi tidak serta merta langsung bekerja, terkadang masa tunggu mendapatkan pekerjaan relatif lama. Selain itu ada juga yang sengaja menarik diri dari dunia kerja karena alasan mencari pekerjaan lebih baik. Kejadian tersebut akan menciptakan pengangguran (terutama terjadi pengangguran terdidik). Walaupun terjadi pengangguran, kehidupan kelompok ini masih ditanggung oleh anggota keluarga lain yang berpenghasilan relatif tinggi, dan dengan demikian rata-rata pendapatan masih berada di atas garis kemiskinan. Berdasarkan data sakernas tahun 2010 (BPS:2011), dimana dari total pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebanyak 47,86% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA ke atas (pengangguran terdidik).

Fakta lain yang menjelaskan pola hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah adanya kenyataan besarnya tingkat pengangguran tersembunyi (bekerja dengan jam kerja yang rendah). Tahun 2010, hanya sebanyak 56,49% dari penduduk yang bekerja yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan jam kerja penuh (35 jam+) selebihnya dengan jam kerja yang rendah. Berarti cukup besar juga angka pengangguran tersembunyi di Kalimantan Barat yaitu sekitar 43,51% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja. Besarnya jumlah pengangguran tersembunyi berarti juga rendahnya jam kerja riil, sehingga akan berakibat pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tenaga kerja selain ditentukan oleh jam kerja juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan. Walaupun mereka bekerja (tidak menganggur), maka pendapatan yang diterima relatif rendah dan dibawah garis kemiskinan. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah, tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Fakta lain juga bisa terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah. Pada kelompok keluarga miskin ini, sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dilibatkan dalam bekerja dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga adanya kecenderungan tingkat pengangguran akan rendah. Karena tingkat pendidikan yang ditamatkan rendah maka tingkat upah ataupun penghasilan yang mereka terima sangat rendah dan dibawah garis kemiskinan. Sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah (karena sebagian besar bekerja), namun mereka tetap miskin. Tahun 2010, dari total angkatan kerja yang bekerja, 61,07 % nya berpendidikan SD ke bawah, sehingga pendapatan yang diterima rendah.

Sejalan dengan studi ini, De Fina (2002) berdasarkan penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa kemiskinan tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pengangguran. Defina lebih lanjut menyatakan bahwa keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemiskinan itu diukur.

Sehubungan dengan pengukuran kemiskinan berdasarkan telaahan De Fina, di Indonesia pengukuran menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Tahun 2010, penduduk Kalimantan Barat dikatakan tidak miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita di atas Rp 211.902,-/bulan Batas garis kemiskinan). Yang perlu dicermati adalah penduduk yang hampir miskin yang kemungkinan angkanya bisa relatif banyak. Penduduk yang tidak menganggur dengan pendapatan sedikit saja di atas garis kemiskinan (Rp 211.902,-/bulan) dalam kategori tidak miskin. Padahal kelompok ini sangat rentan terhadap kenaikan harga (inflasi). Karena jika harga naik pada tahun tersebut, penduduk yang hampir miskin ini akan secara riil menjadi miskin. Meskipun menurut data statistik (BPS) di tahun yang bersangkutan, mereka ini tidak terdata sebagai penduduk miskin. Selain itu standar garis kemiskinan yang digunakan di Indonesia sangat rendah.

Menurut Bank Dunia, bila garis kemiskinan dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) US \$ 1 perkapita/hari, persentase kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 5,9% pada tahun 2008, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 6,7%. Sementara itu bila dihitung berdasarkan PPP US \$ 2 perkapita/hari, persentase kemiskinan adalah sebesar 42,6% (Kuncoro, 2010:144).

Demikian juga dengan pengangguran, di Indonesia pengukuran pengangguran berdasarkan konsep BPS yaitu jika 1 jam saja penduduk bekerja dalam 1 minggu, maka sudah dikatakan bekerja. Sehingga dengan jam kerja yang rendah, tentunya pendapatan yang diperoleh relatif rendah. Dengan tidak menganggur tetapi tetap miskin. Di Kalimantan Barat, walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (25,00%) tetapi sektor ini juga yang menyerap tenaga kerja paling besar (60,43%), sehingga menghasilkan produktivitas paling rendah (Rp 5.828,08) dibandingkan sektor lainnya. Dengan produktivitas yang sangat rendah, tidak mengherankan bahwa petani di Kalimantan Barat secara rata-rata miskin, walaupun dalam kategori tidak menganggur. Penyebabnya adalah kecilnya lahan yang digarap oleh petani. Dengan jumlah lahan yang kecil dan juga jam kerja yang rendah serta banyaknya tenaga kerja yang terlibat di sektor ini menyebabkan petani miskin walaupun tidak menganggur.

Hal ini dibuktikan oleh Son dan Kakwani (2006) berdasarkan penelitian dengan menggunakan data Brazil. Son dan Kakwani mengadakan penelitian dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu menggunakan data tingkat pengangguran dengan ukuran pengangguran konvensional dan menggunakan data pengangguran dengan ukuran pengangguran yang dimodifikasi. Pengangguran dengan ukuran konvensional hasilnya adalah hubungan antara pengangguran dan kemiskinan terlihat tidak signifikan. Dengan memodifikasi pengukuran tingkat pengangguran konvensional mereka menemukan bahwa korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi signifikan. Penjelasan lain adalah bahwa rumah tangga miskin hampir tidak mungkin menjadi penganggur (Oshima 1990). Pernyataan Oshima tersebut dapat dipahami mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup mau tidak mau harus bekerja meskipun hanya beberapa jam seminggu.

Kajian yang dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat ini bertentangan dengan teori. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara. Kajian yang mendukung teori dan yang bertentangan dengan kajian ini dilakukan di Nigeria, misalnya Osinubi (2005) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan dan pengaruhnya adalah pasti miskin.

## **VI. Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian**

### **Simpulan**

1. Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
2. Penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Ini terutama terjadi pada pengangguran terdidik dan total pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, sebanyak 47,86% adalah pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan Tamat SLTA ke atas (pengangguran terdidik). Disisi lain, kenyataan besarnya tingkat pengangguran tersembunyi (bekerja dengan jam kerja yang rendah atau dengan pendidikan yang rendah). Walaupun mereka bekerja (tidak menganggur), namun pendapatan yang diterima relatif rendah dan dibawah garis



kemiskinan (angka pengangguran tersembunyi di Kalimantan Barat yaitu sekitar 43,51% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja).

3. Pada kelompok keluarga yang sangat miskin, justru tingkat pengangguran rendah karena sebagian besar anggota keluarga bekerja untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak-anak juga dilibatkan dalam bekerja dengan alasan penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga, terutama pada keluarga petani dengan pendidikan yang rendah (dari total angkatan kerja yang bekerja, 61,07 % nya berpendidikan SD ke bawah, sehingga pendapatan yang diterima rendah). Di Kalimantan Barat walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (25,00% ) tetapi sektor ini juga yang menyerap tenaga kerja paling besar (60,43%) sehingga menghasilkan produktivitas paling rendah (Rp 5.828,08) dibandingkan sektor lainnya. Dengan produktivitas yang sangat rendah, tidak mengherankan bahwa petani di Kalimantan Barat secara rata-rata miskin, walaupun dalam kategori tidak menganggur.

### Saran

1. Yang berhubungan dengan pengangguran dan kemiskinan, pemerintah daerah perlu peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan akses pendidikan sampai ke pelosok daerah. Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APK) SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
2. Perlu mengembangkan infrastruktur daerah dan struktur industri yang kokoh dengan menciptakan industri turunan untuk mendukung berkembangnya sektor pertanian. Perlu adanya pengembangan industri yang berhubungan dengan pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan hasil dari perkebunan kelapa sawit, karet, perikanan dan peternakan.

### Keterbatasan Studi

Terdapat keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu :

1. Penggunaan data skunder yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah. Ketidakakuratan pengumpulan data serta penggunaan pendekatan yang kurang tepat tentunya berpengaruh terhadap temuan dalam studi ini.
2. Periode studi yang relatif pendek yaitu 6(enam) tahun, hal ini menyebabkan analisis permasalahan kurang sempurna. Proses pembangunan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat dinilai hasilnya.

### REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2006a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2005*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2007a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2008a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- \_\_\_\_\_. 2009. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2009a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2010a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Keadaan Angkatan Kerja di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011a. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bellinger, W. K. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- De Fina, Robert H. 2002. The Impact Of Unemployment On Alternatif Poverty Measures, *Working Paper*, Departement Reseach Federal Reserve Bank Of Filadelfia, May 2002.
- Kakwani N, Pernia EM. 2000. What is pro-poor growth? *Asian Development Review* 18:1, 1-16.
- Octaviani, Dian. 2001. Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke, *Media Ekonomi*, Hal. 100- 118, Vol. 7, No. 8.
- Oreggia E Rodriguez and Andres Rodniguez-Pose. 2004. The Regional Return of Public Investment Policies in Mexico. *Elsevier Ltd. World Development* Vol.32, No.9. pp. 1545-1562.
- Oshima, Herry. 1990. Population and Inequality In East Asia, *Malayan Economic Review* 15: pp. 7-41
- Osinubi, Tokunbo Simbowale. 2005. Macroeconometric Analysis Of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria, *Pakistan Economic and Social Review*. Volume XLIII, No. 2 (Winter 2005), pp. 249-269.
- Perry GE, Arias OS, Lopez JH, Maloney WF, Serven L. 2006. Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles. New York: *World Bank* .
- Ravallion M. 2006. Inequality is Bad for The Poor. *World Bank Policy Research Working Paper* 3677.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Negara RI. 2003. *UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Pokok Ketenagakerjaan*. Jakarta
- Sen A. 1995. A Sociological Approach to The Meaurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers* 37: 669-676.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, MP dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Edisi ke Delapan, Jakarta: Erlangga.
- Warr P. 2006. Poverty and growth in southeast asia. *ASEAN Economic Bulletin* 23: 279 – 302.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: Indopov.